

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dengan pembaharuan subjek pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 secara ekonomis, efektifitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Desentralisasi pemerintah daerah kabupaten dan kota menunjukkan kemampuannya dalam pengelolaan terhadap daerahnya masing-masing dalam meningkatkan kinerja mereka. Ini merupakan tantangan bahwa daerah mampu mendesain dan melaksanakan program yang sesuai dengan kondisi lokal yang patut disikapi dengan kepercayaan diri dan tanggung jawab penuh.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Halim (2008) menjelaskan bahwa analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan pertumbuhan (Sularso & Restianto, 2011). Juliawati dkk. (2012) mengungkapkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan mempunyai pengaruh yang signifikan baik secara simultan maupun secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah. Nugroho (2012) menemukan pengaruh yang negatif antara belanja modal dengan kinerja keuangan pemerintah secara langsung, tetapi jika ditambahkan PAD sebagai variabel intervening maka

belanja modal dan kinerja keuangan memiliki pengaruh yang positif. Permasalahan muncul ketika adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah dimasyarakat (Keefer dan Khemani, 2003).

Menurut Ulum (2012:20) pengukuran kinerja adalah cara untuk mempertahankan prestasi berbagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah. Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan dan juga membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan tersebut. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Anggaran yang telah disusun memiliki peranan sebagai perencanaan dan sebagai kriteria kinerja, yaitu anggaran digunakan sebagai sistem pengendalian untuk mengukur kinerja manajemen. Seiring dengan peranan anggaran tersebut, kunci dari kinerja yang efektif adalah apabila tujuan dari anggaran tercapai dan partisipasi di bawahannya memegang peranan penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Menurut Bastian (2006: 267) dalam Fifi dan Nadirsyah (2016: 3) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian untuk sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impact).

Pengertian pendapatan asli daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Julitawati dalam Sri (2017:63) menyatakan bahwa kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pengembangan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah yang lain. Oleh karena itu untuk mengatasi ketimpangan fiskal pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD untuk mendanai daerah dalam pelaksanaan kegiatan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10 menyatakan bahwa sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah antara lain berasal dari PAD yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur kemampuan suatu daerah. Semakin besar kontribusi yang diberikan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin besar kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan di daerahnya sendiri dan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Kemampuan

perolehan PAD mencerminkan kemampuan daerah tersebut dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerahnya, juga menunjukkan kemandirian keuangan daerahnya semakin baik. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Mahmudi, (2010).

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Warsito, dkk (2008) mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Penelitian yang dilakukan oleh Baihqi dari fakultas ekonomi universitas Bengkulu pada tahun 2011 dengan judul “ Analisis Kontribusi Pendapatan Asli terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu”. Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan data sekunder. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontribusi terhadap pendapatan daerah, analisis kontribusi komponen PAD, analisis tingkat kontribusi komponen PAD terhadap pendapatan daerah serta analisis pertumbuhan PAD dan pendapatan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah di provinsi Bengkulu belum begitu berperan, hal ini terlihat dari adanya fluktuasi kenaikan dan penurunan persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah selama periode 2005-2008.

Penelitian yang dilakukan oleh Gebriany Pirade Wenur dari fakultas ekonomi jurusan akuntansi universitas sam ratulangi manado pada tahun 2013 dengan judul “ Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Kota Bitung”. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu peneliti akan mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan, kemudian dengan data-data tersebut akan dilakukan suatu analisa mengenai sampai sejauh mana penerimaan pajak dan retribusi daerah yang mampu memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah kota bitung. Hasil penelitian yang dilakukan maka diketahui PAD sebagian besar dananya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Realisasi pajak dan retribusi daerah setiap tahun mengalami peningkatan dan telah mampu mencapai target yang telah ditetapkan. PAD kota bitung dari persentase yang diperoleh kontribusi PAD dalam membiayai daerah masih dibawah 10%.

Penelitian yang dilakukan oleh Cherrya Dhia Wenny dari STIE MDP dengan judul “ analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Sumatra selatan”. Alat analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif, dengan model regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Sumatra selatan.

Berdasarkan pendapat ketiga ahli diatas maka untuk menganalisis kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja langsung dan implikasinya terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat dilihat pada Tabel 1 .1 berikut :

Tabel 1.1

Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten
Timor Tengah Selatan Tahun 2017-2020

Tahun	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi BelanjaLangsung
2017	189.534.208.708,67	1.103.505.388.593,81
2018	71.487.909.124,46	1.189.388.453.734,00
2019	77.594.808.656,42	1.130.429.433.639,00
2020	64.192.990.192,85	1.077.308.817.104,00

Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten TTS Tahun 2017-2020

Jika dilihat dari laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017-2020 Realisasi anggaran belanja langsung belum mencapai presentasi 95% yang disebabkan masih adanya permasalahan dari segi belanja, seperti adanya kenaikan dan penurunan yang tidak stabil pada realisasi belanja namun dalam sisi anggaran selalu naik, adanya sisi anggaran yang tidak terealisasi, realisasi belanja langsung yang belum mencapai target dan adanya ketidak seimbangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017-2020”**

1.2 MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan”

1.3 PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka persoalan dalam penelitian ini yaitu Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan antara lain :

- a. Seberapa Besar Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
- b. Seberapa Besar Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung dan Implikasinya terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2017-2020

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Seberapa Besar Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
2. Untuk Mengetahui Seberapa Besar Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung dan Implikasi Terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten Timor Tengah Selatan

1.4.2 Manfaat Penelitian

1.4.2.1 Manfaat Akademis

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasana keilmuan Akuntansi terutama akuntansi sektor publik, serta peneliti lanjutan dalam bidang yang sama

1.4.2.2 Manfaat Praktis

1.4.2.2.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti yaitu untuk dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam memahami tentang Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

1.4.2.2 Bagi Intansi

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan masukan dan dapat mengetahui bahwa pentingnya tentang Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja langsung dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

1.4.2.3 Bagi Pembaca

Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja langsung dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan